



PERUBAHAN RESTRA

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2018- 2023

OPD : KECAMATAN LUMAJANG

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahnya Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (P - Renstra) Kecamatan Lumajang dapat diselesaikan.

Dokumen ini merupakan perubahan dari Renstra Kecamatan Lumajang 2018 - 2023 mengingat dasar penyusunan Renstra yaitu RPJMD Kabupaten Lumajang yang juga mengalami perubahan.

Selanjutnya, dokumen ini akan menjadi dasar pencapaian target kinerja Kecamatan Lumajang 3 (tiga) tahun ke depan

Demikian Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) ini disusun. Semoga dapat bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan, peningkatan kinerja serta penilaian kinerja.

Lumajang, 07 Pebruari 2022

CAMAT Lumajang

Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si.

NIP 19701218 199101 1 002

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II GAMBARAN KECAMATAN LUMAJANG 7

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur OPD Kecamatan Lumajang 7

2.2 Sumberdaya OPD Kecamatan Lumajang 18

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Lumajang 27

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 32

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Lumajang 32

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 32

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi 34

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD 35

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis 40

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 44

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Lumajang..... 44

BAB V STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN 45

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 47

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 55

BAB VIII PENUTUP 56

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan adanya P-RPJMD Kabupaten Lumajang maka Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang berkewajiban menyusun Perubahan Renstra 2018-2023 untuk menentukan arah, tujuan dan upaya-upaya yang akan dilakukan dan dicapai dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan.

Perubahan Renstra Kecamatan Lumajang Tahun 2018-2023 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Lumajang serta berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023.

Kecamatan Lumajang, sebagai salah satu instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya yang keberadaannya sebagai unsur penunjang pemerintah di bidang perencanaan pembangunan, berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis. Dengan demikian diharapkan dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global.

Dokumen Perubahan Renstra ini disusun dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai pada Tahun 2023,

Untuk mewujudkan masyarakat Lumajang yang Mandiri, Sejahtera, Demokratis dan berakhlak mulia dalam naungan pemerintahan yang amanah, maka Kecamatan Lumajang menuangkan dalam visi Kabupaten Lumajang yaitu “ **TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG BERDAYA SAING MAKMUR DAN BERMARTABAT**”

Sedangkan untuk mewujudkan Visi tersebut Kecamatan Lumajang mempunyai Misi sebagai berikut :

1. Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih (*good and clean governance*).

Pemerintahan Kecamatan sebagai penyelenggara pemerintahan yang merupakan ujung tombak pembangunan, mempunyai peranan dan fungsi sebagai sumber data dan informasi, sebagai sumber peningkatan jiwa gotong royong dalam segala segi kehidupan, dan merupakan landasan bagi pelaksanaan pembinaan peran serta masyarakat.

Tuntutan seorang aparatur Pemerintah harus mempunyai profesionalitas dan dedikasi yang tinggi pada setiap tugas yang diemban serta loyalitas kepada Pimpinan adalah modal utama dalam mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sehingga dalam melaksanakan tugas dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab yang tinggi, baik tugas pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan masyarakat secara menyeluruh dan merata di semua lapisan masyarakat.

Dalam mewujudkan pembangunan masyarakat secara merata ditingkat Kecamatan, khususnya di Kecamatan Lumajang telah dilakukan berbagai kegiatan pembangunan, hal ini telah diimplementasikan dalam program kerja tahun-tahun sebelumnya, sehingga dengan program kerja tersebut dapat mewujudkan keberhasilan pembangunan yang telah diprogramkan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Hal tersebut menjadi tantangan bagi aparat pada Kecamatan Lumajang dimana diharapkan mampu menyusun Perubahan Rencana Strategis kemudian dijabarkan dalam Rencana Kinerja yang sesuai dengan kondisi spesifik daerahnya guna meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Didalam meningkatkan upaya pelayanan yang mengarah pada efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan masyarakat pada Kecamatan Lumajang perlu disusun dan ditetapkan kebijakan program kerja baru yang disesuaikan dengan kondisi saat ini.

Adapun keterkaitan dokumen Perubahan Renstra dengan dokumen lainnya, antara lain sebagai berikut :

- Dokumen Perubahan Renstra ini merupakan penjabaran Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) dengan ruang lingkup perangkat daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, yang setiap tahun akan dijabarkan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang.

Berkenaan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan salah satu instrumen pertanggungjawaban pemerintah, maka Perubahan Renstra atau Perubahan Rencana Strategis ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Instruksi Undang-Undang No. 86 Tahun 2017 dan sekaligus langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

1.2 Landasan Hukum

Dokumen Perubahan Rencana Strategis (P RENSTRA) Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang Tahun 2021 - 2021 disusun atas dasar :

1. Landasan Riil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : Undang-undang Dasar RI 1945
3. Landasan Operasional :
 - 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkup Provinsi Jawa Timur ;
 - 2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4286) ;

- 3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442) ;
- 4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
- 6) Peraturan Presiden RI Nomor 07 Tahun 2005 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ;
- 7) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- 8) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2005 tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2006-2008 ;
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 02 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2010-2014 ;
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023.
- 11) Inpres PUG No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional;
- 12) Permendagri No. 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
- 13) Surat Edaran bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Dalam negeri, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Nomor : 270/M.PPN/11/2012
Nomor : SE-33/MK.02/2012
Nomor : 050/4379A/2012

Nomor : SE 46/MPP-PA/11/2012

Tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Lumajang Tahun 2018-2023 suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai di lingkungan Kecamatan Lumajang dan kondisi yang diinginkan selama 3 (tiga) tahun ke depan dalam rangka mendorong pencapaian Visi dan Misi Pemerintah daerah Kabupaten Lumajang yang tertuang dalam P-RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Perubahan (Renstra Perubahan) Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 adalah untuk :

1. Merumuskan tujuan, sasaran, kebijakan, program serta kegiatan dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.
2. Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang lazim disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Lumajang.
3. Sebagai barometer hasil kinerja pemerintah Kecamatan Lumajang.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- B. Sumberdaya Perangkat Daerah
- C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- B. Telaahan Visi, Misi dan Program kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- C. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
- E. Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

- A. Visi dan Misi Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
- B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

BAB V : STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

- A. Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI : RENCANA PROGRAM & KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berisikan Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan jangka menengah yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun Renstra 2023.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisikan rumusan indikator kinerja tujuan maupun sasaran Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang yang mengacu/mendukung pencapaian tujuan dan sasaran P-RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023.

BAB VIII : PENUTUP

Memuat kata-kata penutup dan kaidah-kaidah didalam pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan

1. Camat

Camat memiliki tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/ atau kelurahan di wilayah kecamatan. Camat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Menyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dapat dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan kelurahan

2. SEKRETARIAT PADA KECAMATAN

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat.

Untuk melaksanakan tugas Sekretariat Kecamatan, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana rencana Sekretariat Kecamatan;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan Kecamatan;
- c. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan keprotokolan;
- d. pengoordinasian penerapan ketatausahaan dan kehumasan;
- e. penyajian evaluasi kelembagaan dan tata laksana;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat

a. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan kerja sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
- c. menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan;
- d. melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan Kecamatan;
- e. melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kecamatan;
- f. melakukan administrasi kepegawaian;

- g. melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang daerah;
- h. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit;
- i. melakukan administrasi barang milik daerah;
- j. melaksanakan surat-menyurat dan kearsipan;
- k. melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- l. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pelaporan program kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
- n. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

b. SUB BAGIAN KEUANGAN

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan Sub Bagian Keuangan;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran;
- d. menyusun laporan perencanaan dan kinerja (rencana strategis/ renstra, rencana kerja/ renja, laporan akuntabilitas kinerja instansi/ LAKIP, pengukuran indeks kepuasan masyarakat;
- e. melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
- f. penyiapan pertanggungjawaban keuangan;
- g. melakukan penyusunan laporan keuangan;
- h. melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi;

- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- k. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. SEKSI PEMERINTAHAN PADA KECAMATAN

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan kerja seksi pemerintahan yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja;
- b. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pemerintahan;
- c. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- d. Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat dengan melakukan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- e. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- f. Melaksanakan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan perundang-undangan;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Kecamatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- h. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- i. Pengoordinasian dan fasilitasi pembentukan forum komunikasi pimpinan di Kecamatan;
- j. Melakukan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- k. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- l. Melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa;

- m. Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- n. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa dan aset Desa;
- o. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- p. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- q. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- r. Pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
- s. Melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- t. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
- u. Pengoordinasian pendampingan Desa di Kecamatan;
- v. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program Seksi Pemerintahan;
- w. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- x. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

4. SEKSI PELAYANAN UMUM PADA KECAMATAN

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan ;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang;
- c. Mengoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi, dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku;
- d. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- e. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;

- f. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
- g. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pelayanan Umum;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

5. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA KECAMATAN

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Mengoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/ Kelurahan dan Kecamatan;
- d. Mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan tingkat Kecamatan;
- e. Melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah, Swasta dan Desa/ Kelurahan di wilayah Kecamatan;
- f. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah Kecamatan;
- g. Melaksanakan fasilitasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa;
- h. Melakukan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan;
- i. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban dan pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa/ Kelurahan
- j. Melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;

- k. Melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- l. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayahnya;
- m. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan;
- n. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- o. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

6. LURAH

Lurah mempunyai tugas membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat. Lurah mempunyai fungsi :

- 1. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- 2. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat;
- 3. Melaksanakan pelayanan masyarakat;
- 4. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
- 5. Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- 6. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat;
- 7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

7. Sekretariat Kelurahan

- a. Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Kelurahan.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sekretariat Kelurahan mempunyai fungsi :
 - 1. Perumusan dan penyusunan rencana kegiatan Sekretariat Kelurahan;

2. Penghimpun rencana kegiatan seksi – seksi sebagai bahan rencana kegiatan Kelurahan;
3. Pelaksanaan koordinasi rencana operasional kegiatan Kelurahan;
4. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, keprotokolan, kelembagaan dan tata laksana;
5. Pelaksanaan koordinasi penerapan ketatausahaan dan kearsipan;
6. Pemberian informasi dan hubungan masyarakat;
7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat Kelurahan;
8. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Lurah; dan
9. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

8. Seksi Pemerintahan Pada Kelurahan

Seksi Pemerintahan pada Kelurahan mempunyai tugas :

1. Menyusun rencan program kerja Seksi Pemerintahan yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pemerintahan Kelurahan;
3. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
4. Melaksanakan pembinaan administrasi kependudukan, tenaga kerja dan catatan sipil;
5. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta satuan perlindungan masyarakat;
6. Melaksanakan pembinaan di bidang pertanahan;
7. Melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pedesaan (PBB-P2);
8. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemerintahan;
9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Lurah; dan
10. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

9. Seksi Pelayanan Umum Pada Kelurahan

Seksi Pelayanan Umum pada Kelurahan mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan umum kelurahan;
3. Menyelenggarakan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
4. Menyelenggarakan pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum;
5. Melaksanakan pelayanan perizinan;
6. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pelayanan Umum;
7. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Lurah; dan
8. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

10. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelurahan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kelurahan mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan;
3. Memantapkan lembaga kemasyarakatan Kelurahan;
4. Memantapkan pola keterpaduan pembangunan Kelurahan melalui penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan Kelurahan;
5. Meningkatkan partisipasi dan pendayagunaan masyarakat dalam pembangunan Kelurahan;
6. Mengoordinasikan penyusunan bahan pembinaan/ fasilitasi bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

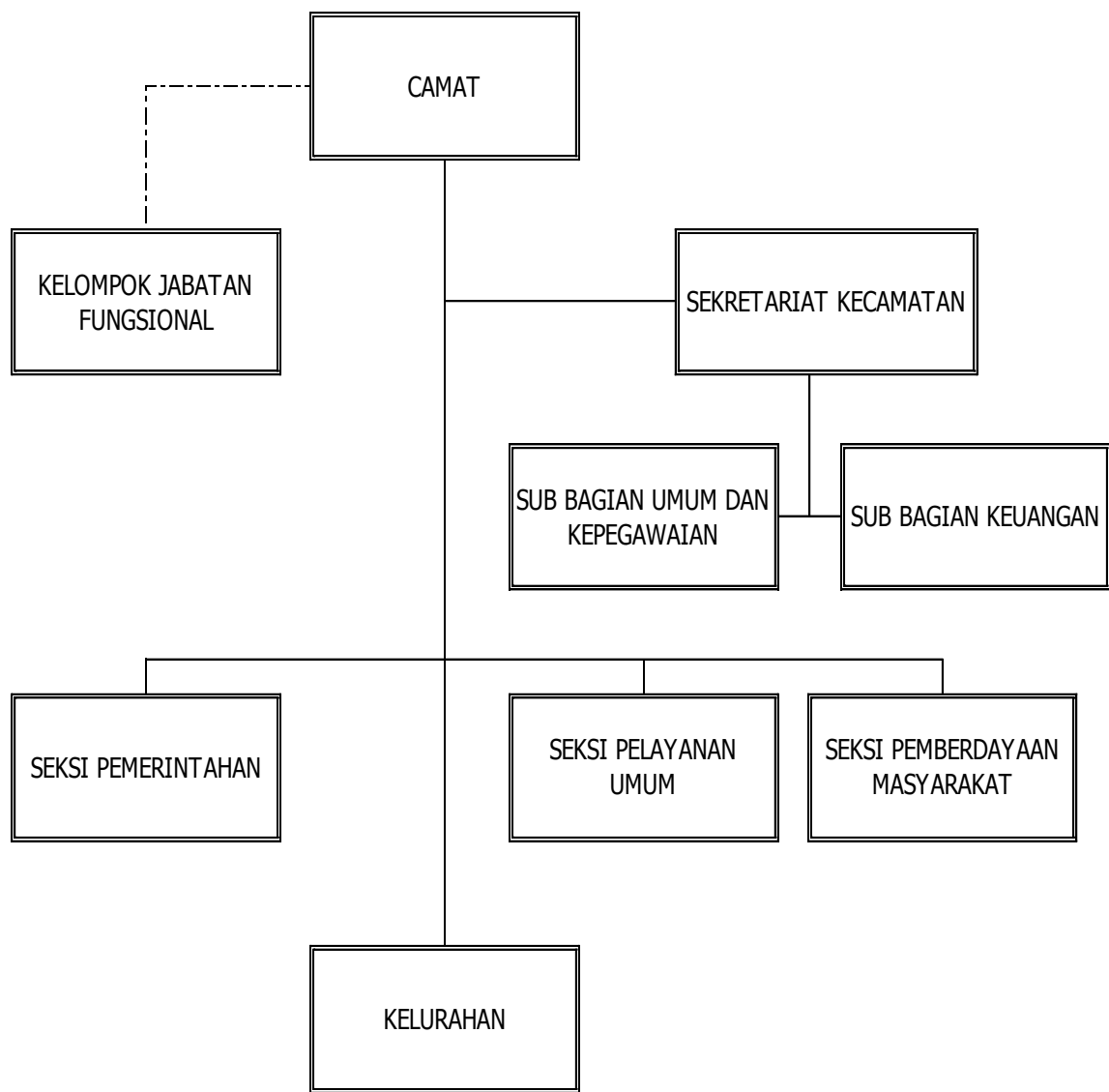
7. Mengoordinasikan penyiapan sarana perekonomian dan pembangunan;
8. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan;
9. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
10. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Lurah; dan Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Keudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Lumajang, maka susunan organisasi Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang terdiri dari:

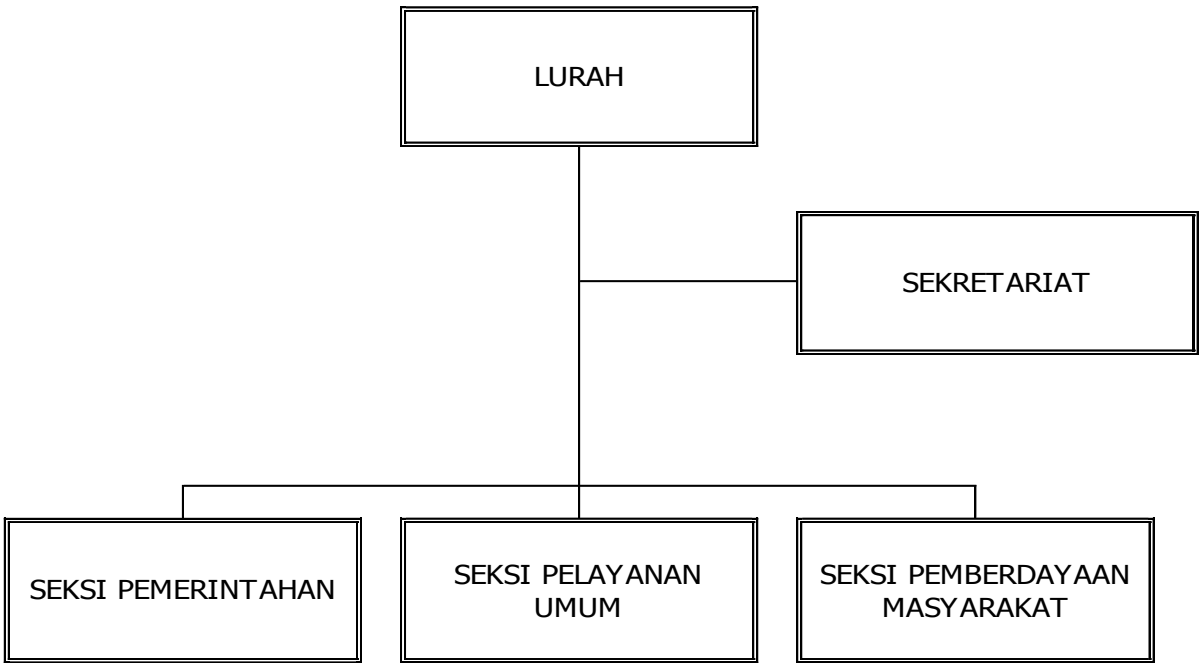
1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan yang terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pelayanan Umum
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun struktur organisasi Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang dapat dilihat sebagai berikut :



Keterangan Gambar 01: Struktur Organisasi Kecamatan Lumajang

Adapun struktur organisasi Kelurahan dapat dilihat sebagai berikut :



Keterangan Gambar 02 : Struktur Organisasi Kelurahan

2.2 SUMBERDAYA OPD KECAMATAN LUMAJANG

Sumberdaya yang terdapat dalam Kecamatan Lumajang dan 7 Kelurahan dengan fungsinya sebagai pendukung dan penggerak pelayanan di Kecamatan Lumajang maupun pada masing – masing Kelurahan meliputi Susunan Kepegawaian yang terdiri dari PNS, tenaga Upah Bulanan dan Perlengkapan.

1. Susunan Kepegawaian

- b. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.1
Data Pendidikan PNS, CPNS, dan TKK Kecamatan Lumajang
Kabupaten Lumajang

NO	PENDIDIKAN	PNS		TKK		JUMLAH		TOTAL
		L	P	L	P	L	P	
1	SD	1	0	1	0	2	0	2
2	SMP	1	0	2	1	3	1	4
3	SMA/SMK	16	7	19	13	35	20	55
4	D1	5	3	1	0	6	3	9
5	D3	3	1	1	1	4	2	6
6	D4	16	4	0	0	16	4	20
7	S1	2	0	8	17	10	17	27
8	S2	44	15	0	0	44	15	59
	JUMLAH	88	30	32	32	120	62	182

Dilihat dari tingkat pendidikan dapat dijelaskan bahwa Pegawai Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang kurang menunjang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam fungsi Administrasi Koordinasi dimana jumlah pegawai terbanyak pada jenjang pendidikan, SMA/SMK dengan jumlah 55 orang, S1 dengan jumlah 45 orang, S2 dengan jumlah 2 orang.

- c. Jumlah Pegawai Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang dan Kelurahan berdasarkan Pangkat/Golongan pada, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Data Pangkat/Golongan PNS, CPNS Kecamatan Lumajang dan
Kelurahan

NO	GOLONGAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	Gol I	5	0	5
2	Gol II	9	3	12
3	Gol III	29	12	41
4	Gol IV	1	0	1
TOTAL		44	15	59

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat jumlah Pegawai pada OPD Kecamatan Lumajang maupun Kelurahan didominasi oleh golongan

ruang III sebanyak 41 orang, golongan ruang IV sebanyak 1 orang, golongan ruang 12 sebanyak 4 orang dan golongan I sebanyak 5 orang. Dengan demikian Pegawai di Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang terbanyak pada golongan III dan II. Dari sisi jumlah sudah cukup dengan langkah lebih mengoptimalkan peran dan fungsi masing-masing personil yang ada.

- d. Disamping pendidikan formal, Pegawai OPD Kecamatan Lumajang telah mengikuti pendidikan struktural. data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3
Pegawai OPD Kecamatan Lumajang
Yang Telah Mengikuti Pendidikan Struktural

NO	Tingkat Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah	Diklat Pim		TOTAL
					IV		
		L	P		L	P	
1	IIa	0	0	0			0
2	IIb	0	0	0			0
3	IIIa	1	0	1			0
4	IIIb	1	0	1			0
5	IVa	8	1	9	5		5
6	IVb	11	10	21			0
	TOTAL	21	11	32	5	0	5

- e. Pegawai OPD Kecamatan Lumajang telah memperoleh jabatan berdasarkan eselon dapat dilihat pada tabel berikut :

2. Perlengkapan

Perlengkapan yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Kecamatan Lumajang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
KONDISI ASET KECAMATAN LUMAJANG

Secara keseluruhan kondisi aset yang dimiliki Kecamatan Lumajang perubahan dan perkembangannya dapat dilihat sebagai berikut:

NO	NAMA BARANG INVENTARIS	JENIS	JML	KONDISI		
				BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
1	Tanah Rumah Dinas Camat Lumajang	Tanah Rumah Dinas Camat Lumajang	1	√		
2	Tanah Kantor Kec. Lumajang	Tanah Kantor Kec. Lumajang	1	√		
3	Generating Set / GENSET	Generating Set / GENSET	1		√	
4	Generating Set / GENSET	Generating Set / GENSET	1	√		
5	Mobil	Mobil	1	√		
6	Spd. Motor	Spd. Motor	1	√		
7	Spd. Motor	Spd. Motor	1	√		
8	Spd. Motor	Spd. Motor	1	√		
9	Sepeda Motor Roda tiga	Sepeda Motor Roda tiga	1	√		
10	Sepeda Motor	Sepeda Motor	1	√		
11	Lemari Arsip / Besi	Lemari Arsip / Besi	1	√		
12	Lemari Arsip / Besi	Lemari Arsip / Besi	1	√		
13	Lemari Arsip / Besi	Lemari Arsip / Besi	1	√		
14	Brankas	Brankas	1	√		
15	Meja Tamu	Meja Tamu	1	√		
16	Kursi : Sofa	Kursi : Sofa	1	√		
17	Meja Rapat	Meja Rapat	1	√		
18	Meja Rapat	Meja Rapat	1	√		
19	Meja Rapat	Meja Rapat	1	√		
20	Kursi Tamu	Kursi Tamu	1	√		
21	Kursi Tunggu Pelayanan	Kursi Tunggu Pelayanan	1	√		
22	Kursi Tunggu Pelayanan	Kursi Tunggu Pelayanan	1	√		
23	Mesin Potong Rumput	Mesin Potong Rumput	1	√		
24	AC / Air Conditioner	AC / Air Conditioner	1	√		
25	AC	AC	1	√		
26	Kipas Angin	Kipas Angin	1	√		
27	Kipas Angin	Kipas Angin	1	√		
28	Kipas Angin	Kipas Angin	1	√		
29	Kipas Angin	Kipas Angin	1	√		
30	Televisi	Televisi	1	√		

NO	NAMA BARANG INVENTARIS	JENIS	JML	KONDISI		
				BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
.31	Televisi / TV	Televisi / TV	1	√		
32	Tape Recorder	Tape Recorder	1	√		
33	Tape Recorder	Tape Recorder	1	√		
34	Amplifier	Amplifier	1	√		
35	Loundspeaker	Loundspeaker	1	√		
36	Loundspeaker	Loundspeaker	1	√		
37	Sound System	Sound System	1	√		
38	Sound System : Soundcraft EFX-12	Sound System : Soundcraft EFX-12	1	√		
39	Stan Mic Besar	Stan Mic Besar	1	√		
40	UPS	UPS	1	√		
41	Stavolt : Tanaka	Stavolt : Tanaka	1	√		
42	Kamera Digital : NIKON	Kamera Digital : NIKON	1	√		
43	Proyektor	Proyektor	1	√		
44	Tangga Alumunium	Tangga Alumunium	1	√		
45	Meja Eselon III	Meja Eselon III	1	√		
46	Meja Kerja Pejabat ES-IV	Meja Kerja Pejabat ES-IV	1	√		
47	Meja Kerja Pejabat ES-IV	Meja Kerja Pejabat ES-IV	1	√		
48	Meja Kerja Pejabat ES-IV	Meja Kerja Pejabat ES-IV	1	√		
49	Meja Kerja Pejabat ES-IV	Meja Kerja Pejabat ES-IV	1	√		
50	Meja Kerja Pejabat ES-IV	Meja Kerja Pejabat ES-IV	1	√		
51	Meja Kerja Pejabat ES-IV	Meja Kerja Pejabat ES-IV	1	√		
52	Meja Kerja Pejabat ES-IV	Meja Kerja Pejabat ES-IV	1	√		
53	Meja Kerja Pejabat ES-IV	Meja Kerja Pejabat ES-IV	1	√		
54	Meja Kerja Staf	Meja Kerja Staf	1	√		
55	Meja Kerja Staf	Meja Kerja Staf	1	√		
56	Meja Kerja Staf	Meja Kerja Staf	1	√		
57	Meja Kerja Staf	Meja Kerja Staf	1	√		
58	Meja Kerja Staf	Meja Kerja Staf	1	√		
59	Meja Kerja Staf	Meja Kerja Staf	1	√		
60	Meja Kerja Staf	Meja Kerja Staf	1	√		
61	Kursi Eselon III	Kursi Eselon III	1	√		

NO	NAMA BARANG INVENTARIS	JENIS	JML	KONDISI		
				BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
62	Kursi Kerja Pejabat ES-IV	Kursi Kerja Pejabat ES-IV	1	√		
63	Kursi Kerja Pejabat ES-IV	Kursi Kerja Pejabat ES-IV	1	√		
64	Kursi Kerja Pejabat ES-IV	Kursi Kerja Pejabat ES-IV	1	√		
65	Kursi Kerja Pejabat ES-IV	Kursi Kerja Pejabat ES-IV	1	√		
66	Kursi Kerja Pejabat ES-IV	Kursi Kerja Pejabat ES-IV	1	√		
67	Kursi Kerja Pejabat ES-IV	Kursi Kerja Pejabat ES-IV	1	√		
68	Kursi Kerja Pejabat ES-IV	Kursi Kerja Pejabat ES-IV	1	√		
69	Kursi Kerja Pejabat ES-IV	Kursi Kerja Pejabat ES-IV	1	√		
70	AC: Ruangan	AC: Ruangan	1	√		
71	AC: Ruangan	AC: Ruangan	1	√		
72	AC: Ruangan	AC: Ruangan	1	√		
73	Lemari Kayu	Lemari Kayu	1	√		
74	Lemari Kayu	Lemari Kayu	1	√		
75	Filing kabinet	Filing kabinet	1	√		
76	Filing kabinet	Filing kabinet	1	√		
77	Kursi Ruang Tunggu	Kursi Ruang Tunggu	1	√		
78	Kursi Ruang Tunggu	Kursi Ruang Tunggu	1	√		
79	Meja Kerja Staf	Meja Kerja Staf	1	√		
80	Meja Kerja Staf	Meja Kerja Staf	1	√		
81	Kursi Putar	Kursi Putar	1	√		
82	Kursi Putar	Kursi Putar	1	√		
83	Neon Box	Neon Box	1	√		
84	Televisi LED 29 inch	Televisi LED 29 inch	1	√		
85	AC (Air Conditioner)	AC (Air Conditioner)	1	√		
86	Papan Data Kecamatan	Papan Data Kecamatan	1	√		
87	Papan Data Kecamatan	Papan Data Kecamatan	1	√		
88	Papan Data Kecamatan	Papan Data Kecamatan	1	√		
89	Papan Data Kecamatan	Papan Data Kecamatan	1	√		
90	Papan Data Kecamatan	Papan Data Kecamatan	1	√		
91	Filing Kabinet	Filing Kabinet	1	√		
92	Filing Kabinet	Filing Kabinet	1	√		

NO	NAMA BARANG INVENTARIS	JENIS	JML	KONDISI		
				BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
93	Lemari Arsip 2 Pintu	Lemari Arsip 2 Pintu	1	√		
94	Lemari Arsip 2 Pintu	Lemari Arsip 2 Pintu	1	√		
95	AC (Air Conditioner)	AC (Air Conditioner)	1	√		
96	AC (Air Conditioner)	AC (Air Conditioner)	1	√		
97	AC (Air Conditioner)	AC (Air Conditioner)	1	√		
98	Meja Kursi Tamu	Meja Kursi Tamu	1	√		
99	Tempat Tidur	Tempat Tidur	1	√		
100	Tempat Tidur	Tempat Tidur	1	√		
101	Meja Makan	Meja Makan	1	√		
102	Screen LCD Manual 100 Inch	Screen LCD Manual 100 Inch	1	√		
103	Air Conditioning 3/4 pk	Air Conditioning 3/4 pk	1	√		
104	Air Conditioning 3/4 pk	Air Conditioning 3/4 pk	1	√		
105	LCD Proyektor	LCD Proyektor	1	√		
106	Kursi Tunggu Pelayanan	Kursi Tunggu Pelayanan	1	√		
107	Kursi Tunggu Pelayanan	Kursi Tunggu Pelayanan	1	√		
108	Table untuk slip pelayanan	Table untuk slip pelayanan	1	√		
109	Meja dan Kursi Customer Care	Meja dan Kursi Customer Care	1	√		
110	Kursi Sandaran	Kursi Sandaran	1	√		
111	Kursi Sandaran	Kursi Sandaran	1	√		
112	Meja dan Kursi Rapat	Meja dan Kursi Rapat	1	√		
113	Handycamp	Handycamp	1	√		
114	Lemari Arsip	Lemari Arsip	1	√		
115	Lemari Arsip	Lemari Arsip	1	√		
116	Lemari Arsip	Lemari Arsip	1	√		
117	Lemari Arsip	Lemari Arsip	1	√		
118	Lemari Arsip	Lemari Arsip	1	√		
119	Lemari Arsip	Lemari Arsip	1	√		
120	Lemari Arsip	Lemari Arsip	1	√		
121	Lemari Arsip	Lemari Arsip	1	√		
122	Lemari Arsip	Lemari Arsip	1	√		
123	Lemari Kaca / etalase	Lemari Kaca / etalase	1	√		
124	Rak Arsip	Rak Arsip	1	√		

NO	NAMA BARANG INVENTARIS	JENIS	JML	KONDISI		
				BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
125	Running Text	Running Text	1	√		
126	Meja Panjang	Meja Panjang	1	√		
127	Meja Panjang	Meja Panjang	1	√		
128	Meja Panjang	Meja Panjang	1	√		
129	Meja Panjang	Meja Panjang	1	√		
130	Kursi Tamu	Kursi Tamu	1	√		
131	Kursi Tamu	Kursi Tamu	1	√		
132	Kursi Tamu	Kursi Tamu	1	√		
133	Kursi Tamu	Kursi Tamu	1	√		
134	AC (Air Conditioner)	AC (Air Conditioner)	1	√		
135	AC (Air Conditioner)	AC (Air Conditioner)	1	√		
136	AC (Air Conditioner)	AC (Air Conditioner)	1	√		
137	Lemari Pendingin	Lemari Pendingin	1	√		
138	Lemari Pendingin	Lemari Pendingin	1	√		
139	Sound system	Sound system	1	√		
140	Tabung pemadam kebakaran	Tabung pemadam kebakaran	1	√		
141	Tabung pemadam kebakaran	Tabung pemadam kebakaran	1	√		
142	Tabung pemadam kebakaran	Tabung pemadam kebakaran	1	√		
143	Tabung pemadam kebakaran	Tabung pemadam kebakaran	1	√		
144	Tangga Alumunium	Tangga Alumunium	1	√		
145	Rak Arsip	Rak Arsip	1	√		
146	Rak Koran	Rak Koran	1	√		
147	Kotak Saran	Kotak Saran	1	√		
148	AC (Air Conditioner)	AC (Air Conditioner)	1	√		
149	CCTV	CCTV	1	√		
150	Power supply	Power supply	1	√		
151	Komputer	Komputer	1	√		
152	Komputer	Komputer	1	√		
153	Komputer	Komputer	1	√		
154	Komputer	Komputer	1	√		
155	Komputer	Komputer	1	√		
156	Komputer	Komputer	1	√		
157	Komputer	Komputer	1	√		

NO	NAMA BARANG INVENTARIS	JENIS	JML	KONDISI		
				BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
158	Komputer PC	Komputer PC	1	√		
159	Lap Top	Lap Top	1	√		
160	Laptop : ASUS	Laptop : ASUS	1	√		
161	Monitor LCD / (Peralatan Komputer)	Monitor LCD / (Peralatan Komputer)	1	√		
162	Monitor LCD / (Peralatan Komputer)	Monitor LCD / (Peralatan Komputer)	1	√		
163	Printer	Printer	1	√		
164	Printer	Printer	1	√		
165	Printer	Printer	1	√		
166	Printer : Canon IP	Printer : Canon IP	1	√		
167	Printer : Canon IP	Printer : Canon IP	1	√		
168	Printer : Canon IP	Printer : Canon IP	1	√		
169	Laptop / Notebook	Laptop / Notebook	1	√		
170	Monitor	Monitor	1	√		
171	Monitor	Monitor	1	√		
172	Scanner : Canon 110	Scanner : Canon 110	1	√		
173	Komputer PC	Komputer PC	1	√		
174	Komputer PC	Komputer PC	1	√		
175	Komputer PC	Komputer PC	1	√		
176	Komputer PC	Komputer PC	1	√		
177	Komputer e-Finance	Komputer e-Finance	1	√		
178	Printer A3	Printer A3	1	√		
179	Printer Laserjet	Printer Laserjet	1	√		
180	Printer Laserjet	Printer Laserjet	1	√		
181	Printer Laserjet	Printer Laserjet	1	√		
182	Televisi LED	Televisi LED	1	√		
183	Notebook : ASUS	Notebook : ASUS	1	√		
184	Notebook : ASUS	Notebook : ASUS	1	√		
185	Printer Canon	Printer Canon	1	√		
186	Printer Canon	Printer Canon	1	√		
187	Televisi LED 32 Inch	Televisi LED 32 Inch	1	√		
188	Komputer PC	Komputer PC	1	√		
189	Komputer PC	Komputer PC	1	√		

NO	NAMA BARANG INVENTARIS	JENIS	JML	KONDISI		
				BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
190	Komputer PC	Komputer PC	1	√		
191	Komputer PC	Komputer PC	1	√		
192	Laptop	Laptop	1	√		
193	Printer	Printer	1	√		
194	Printer	Printer	1	√		
195	Printer	Printer	1	√		
196	Printer	Printer	1	√		
197	Printer	Printer	1	√		
198	Printer	Printer	1	√		
199	Printer	Printer	1	√		
200	Printer A3	Printer A3	1	√		
201	Laptop	Laptop	1	√		
202	Laptop	Laptop	1	√		
203	Scanner	Scanner	1	√		
204	SSB+	SSB+	1	√		
205	intercom : Telephone antar ruang	intercom : Telephone antar ruang	1	√		
206	intercom : Telephone antar ruang	intercom : Telephone antar ruang	1	√		
207	intercom : Telephone antar ruang	intercom : Telephone antar ruang	1	√		
208	intercom : Telephone antar ruang	intercom : Telephone antar ruang	1	√		
209	intercom : Telephone antar ruang	intercom : Telephone antar ruang	1	√		
210	intercom : Telephone antar ruang	intercom : Telephone antar ruang	1	√		
211	intercom : Telephone antar ruang	intercom : Telephone antar ruang	1	√		
212	intercom : Telephone antar ruang	intercom : Telephone antar ruang	1	√		
213	intercom : Telephone antar ruang	intercom : Telephone antar ruang	1	√		
214	intercom : Telephone antar ruang	intercom : Telephone antar ruang	1	√		
215	intercom : Telephone antar ruang	intercom : Telephone antar ruang	1	√		

NO	NAMA BARANG INVENTARIS	JENIS	JML	KONDISI		
				BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
216	intercom : Telephone antar ruang	intercom : Telephone antar ruang	1	√		
217	Handphone	Handphone	1	√		
218	Kursi Roda	Kursi Roda	1	√		

2.3 KINERJA PELAYANAN KECAMATAN LUMAJANG

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Lumajang nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang menyebutkan bahwa Kecamatan Lumajang adalah unsur Penunjang Pemerintah Daerah dibidang Pelayanan Masyarakat, Sehingga secara garis besar unsur pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Lumajang adalah penyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di Bidang Pelayanan Masyarakat.

Pelayanan di bidang Pelayanan Masyarakat ini di tunjukan melalui penyediaan perencanaan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Keberhasilan pelayanan tersebut tidak terlepas dari kerjasama di antara

personel karyawan/karyawati di lingkungan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang maupun kerjasama lintas sektoral diantara satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Sementara Output pelayanan yang dilaksanakan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang antara lain :

1. Penelitian dan Pengembangan, yaitu penelitian dan pengembangan yang dilakukan untuk mengkaji permasalahan-permasalahan strategis pelayanan di kawasan strategis daerah;
2. Penyusunan Dokumen Perencanaan, yaitu penyusunan rencana pembangunan daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan jangka Menenngah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD), serta asistensi penyusunan rencana strategis SKPD, Rencana Kerja SKPD dan Dokumen perencanaan yang terkait dengan anggaran seperti KUA dan Dokumen lain.

3. Penyusunan rencana induk (masterplan), rencana umum, studi kelayakan (fesibility study) kegiatan fisik dan non fisik pembangunan daerah;
4. Penataan Ruang dan Pengendalian pemanfaatan ruang, yaitu penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Kawasan Srategis Daerah;
5. Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pelayanan Masyarakat, berupa pendataan dan analisis kinerja pelayanan yang dilakukan oleh seluruh SKPD serta penyediaan data umum Pelayanan Masyarakat;
6. Pelayanan Ketatausahaan Kecamatan Lumajang, berupa Pengelolaan Program dan Kegiatan Kecamatan Lumajang, Pengelolaan Keuangan Kecamatan Lumajang, Pengelolaan Kepegawaian Kecamatan Lumajang, dan Ketatausahaan umum lainnya;

Secara lengkap, pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2 TC- 23

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KANTOR KECAMATAN LUMAJANG
KABUPATEN LUMAJANG

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	TUJUAN																		
1	Nilai IKM				tidak ada data	tidak ada data	100	100	100	tidak ada data	tidak ada data	83,6	84	84	tidak ada data	tidak ada data	0,84	0,84	0,84
	SASARAN																		
1	Nilai IKM Kecamatan				tidak ada data	tidak ada data	100%	100%	100%	tidak ada data	tidak ada data	83,6	84	84	tidak ada data	tidak ada data	83,60	84,00	84,00
2	Presentase hasil fasilitasi dan kooordinasi yang ditindaklanjuti				tidak ada data	tidak ada data	100%	100%	100%	tidak ada data	tidak ada data	98%	97%	92%	tidak ada data	tidak ada data	0,98	0,97	0,92
3	Presentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu				tidak ada data	tidak ada data	100%	100%	100%	tidak ada data	tidak ada data	98%	97%	92%	tidak ada data	tidak ada data	0,98	0,97	0,92

Tabel 2.3 TC- 24

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KANTOR KECAMATAN LUMAJANG KABUPATEN LUMAJANG																	
Uraian Indikator	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi pada Tahun ke...					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke ...					Rata - rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Nilai IKM	Tidak ada Data	Tidak ada Data	452.803.350	745.966.350	1.287.096.000	Tidak ada Data	Tidak ada Data	441.774.724	719.001.972	1.158.219.556	Tidak ada Data	Tidak ada Data	Tidak ada Data	0,964	0,900	0,725	0,611
Nilai IKM Kecamatan	Tidak ada Data	Tidak ada Data	24.714.000	26.045.000	58.500.000	Tidak ada Data	Tidak ada Data	24.714.000	24.865.000	58.300.000	Tidak ada Data	Tidak ada Data	Tidak ada Data	0,955	0,997	1,246	1,345
Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Tidak ada Data	Tidak ada Data	84.693.850	81.921.250	355.928.000	Tidak ada Data	Tidak ada Data	81.906.350	81.921.250	348.728.000	Tidak ada Data	Tidak ada Data	Tidak ada Data	1,000	0,980	3,345	3,257
persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	Tidak ada Data	Tidak ada Data	107.899.900	106.067.400	10.500.000	Tidak ada Data	Tidak ada Data	107.899.900	106.062.400	10.408.000	Tidak ada Data	Tidak ada Data	Tidak ada Data	1,000	0,991	-0,901	-0,902

**BAB
III****PERMASALAHAN DAN ISU-ISU
STRATEGIS DAERAH****3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS
DAN FUNGSI KECAMATAN LUMAJANG**

Identifikasi permasalahan dapat dilakukan dengan melakukan analisis eksternal dan internal didahului dengan pengidentifikasian kekuatan / strenghts (S), kelemahan / weaknesses (W), peluang / opportunities (O) dan ancaman / threats (T) yang dimiliki Kecamatan Lumajang berkaitan dengan perwujudan visi yang ditetapkan.

Kondisi internal terdiri dari kekuatan / strenghts (S) dan kelemahan / weaknees (W) yang dimiliki Kecamatan Lumajang. Pengidentifikasian kekuatan dan kelemahan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

▪ K e k u a t a n / S t r e n g h t s (S)

1. Kuantitas Sumberdaya Manusia yang mencukupi untuk penyelenggaraan tugas - tugas pemerintahan, pemberdayaan masyarakat desa, ketentraman dan ketertiban, serta kesejahteraan masyarakat.
2. Tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dalam penyelenggaraan tugas - tugas pemerintahan, pemberdayaan masyarakat desa, ketentraman dan ketertiban, serta kesejahteraan masyarakat.
3. Adanya sarana dan prasarana sebagai alat penunjang untuk penyelenggaraan tugas - tugas pemerintahan, pemberdayaan masyarakat desa, ketentraman dan ketertiban, serta kesejahteraan masyarakat.
4. Tersedianya dana untuk pelaksanaan tugas - tugas pemerintahan, pemberdayaan masyarakat desa, ketentraman dan ketertiban, serta kesejahteraan masyarakat.

▪ K e l e m a h a n / W e a k n e s s (W)

1. Belum sesuai kualitas SDM dengan disiplin ilmu terkait dengaSXn tugas pokok dan fungsi.

2. Belum optimalnya ketersediaan dana, sarana dan prasarana sebagai penunjang pelaksanaan tugas - tugas.

Kondisi eksternal terdiri dari peluang / opportunities (O) dan ancaman / threats (T) yang di hadapi oleh Kecamatan Lumajang. Pengidentifikasian peluang dan ancaman yang dihadapi oleh kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

▪ **P e l u a n g / O p p o r t u n i t i e s (O)**

1. Dilakukannya reviu RPJM serta ketentuan lainnya sebagai pedoman reviu Renstra OPD.
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pembangunan.
3. Kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM pegawai melalui pendidikan formal dan informal (kursus / pelatihan)

▪ **A n c a m a n / T h r e a t s (T)**

1. Koordinasi penyelenggaraan program - program pembangunan masing - masing instansi di Kecamatan yang belum optimal.
2. Terbatasnya kewenangan Camat dibandingkan dengan tugas - tugas yang harus ditangani di wilayah kecamatan.
3. Perkembangan pembangunan yang semakin cepat.

Berdasarkan faktor - faktor internal dan eksternal yang telah teridentifikasi disusun strategi. Strategi adalah pemikiran - pemikiran secara konseptual, analitis, rasional dan komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam visi dan misi sesuai dengan faktor lingkungan internal dan eksternal. Strategi - strategi yang didisusun berdasarkan analisis SWOT menggunakan pendekatan - pendekatan sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada / tersedia (S+O)
- b. Mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang yang ada / tersedia (W+O)

- c. Menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi kelemahan (S+T)
- d. Mengurangi kelemahan untuk mencegah / mengatasi ancaman (W+T)

3.2 Telaahan Visi, Misi

Visi Kabupaten Lumajang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2019 – 2023 yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Lumajang Yang Berdaya Saing, Makmur, dan Bermartabat”.

Untuk mewujudkan Visi tersebut dirumuskan Misi Prioritas Pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Secara garis besar akan di tempuh melalui salah satu 1 Misi Pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

- a. Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance);

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung-jawab dalam pengkoordinasian proses perencanaan pembangunan Kabupaten Lumajang, Kecamatan Lumajang turut bertanggung- jawab dalam mewujudkan salah satu misi pembangunan tersebut.

Kecamatan Lumajang sebagai salah satu OPD pendukung kinerja Bupati dan Wakil Bupati terpilih, merupakan bagian integral diantara beberapa OPD yang mendukung terealisasinya misi yang ke 3 (tiga), **“Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance) yang berbasis teknologi”**. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih memiliki tolok ukur indeks reformasi birokrasi, yang mana sasarannya adalah kualitas pelayanan Kecamatan

Lumajang yang meningkat. Peningkatan ini ditandai dengan meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja pemerintah dan opini Badan Pemeriksaaan Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan

pemerintah daerah yang wajar tanpa pengecualian. Dalam konteks ini maka peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian diberbagai sector, serta penelitian dan pengembangan untuk mendorong inovasi daerah merupakan factor kunci tercapainya misi tersebut.

Sebagaimana disebutkan dalam bab sebelumnya bahwa kinerja pelayanan Kecamatan Lumajang diukur berdasarkan penerapan SPM urusan yang merupakan kewenangan Kecamatan Lumajang yaitu Urusan Perencanaan Pembangunan, Urusan Penataan Ruang dan Urusan. Adapun arah pembangunan dan strategi dalam RPJMD Kabupaten Lumajang yang berkaitan erat dan merupakan kewenangan dari Kecamatan Lumajang meliputi :

- a. Meningkatkan dan mengefektifkan pengendalian tata ruang daerah melalui dokumen tata ruang dan penegakan penerapannya dengan strategi yaitu Melakukan kajian dan penyusunan rencana detail tata ruang kawasan dan peraturan zonasi sesuai dengan RTRW
- b. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan dengan strategi meliputi :
 1. Menyusun dokumen perencanaan berkualitas dan berkelanjutan
 2. Menyediakan data statistik daerah yang akurat
 3. Mengembangkan sistem pengelola database yang terintegrasi
 4. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan

3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur

Telaah rencana strategis kementerian dan Bappeda Provinsi Jawa Timur merupakan upaya untuk mensinergikan arah kebijakan,

program dan kegiatan agar pelaksanaan pembangunan dalam kewenangan Bappeda berjalan sinergis dengan target dan arah kebijakan kementerian dan pemerintah provinsi Jawa Timur.

Penelaahan ditekankan pada visi, misi, arah kebijakan dan strategi sebagaimana berikut :

a. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Visi KPPN/Bappenas adalah "Mewujudkan Kementerian PPN/Bappenas yang andal, kredibel dan proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara" dengan misi meliputi :

1. Menyusun rencana pembangunan nasional yang berkualitas dalam rangka:
 - a. mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi), dan mensinergikan baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dengan daerah;
 - b. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
 - c. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
 - d. menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas terhadap permasalahan pembangunan, sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang.
3. Melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas

Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun kedepan meliputi Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan nasional melalui penataan sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan; pengembangan sistem dan kualitas data dan

informasi perencanaan pembangunan nasional; serta peningkatan kualitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

1. Penerapan perencanaan pembangunan nasional dan penganggaran yang berbasis kinerja.
2. Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan/kajian sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian permasalahan pembangunan.
3. Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan.
4. Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga dan pegawai.

Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan mencakup eksternal dan internal sebagaimana berikut :

Eksternal:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran sektoral, lintas sektoral dan wilayah, dan antara pusat dan daerah; serta keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
2. Meningkatkan kualitas pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional.
3. Meningkatkan kualitas evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional.
4. Meningkatkan kualitas kajian dan atau evaluasi kebijakan pembangunan.
5. Meningkatkan kualitas koordinasi kebijakan pembangunan nasional.

Internal:

1. Membangun Manajemen Kinerja dari kinerja lembaga hingga kinerja individu/pegawai.

2. Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif, dan akuntabel serta diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai.
3. Meningkatkan kompetensi SDM di Kementerian PPN/Bappenas dan perencana di tingkat pusat dan daerah secara lebih proporsional dan akuntabel.
4. Melanjutkan penerapan prinsip-prinsip good governance di Kementerian PPN/Bappenas.
5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dan pengelolaannya dalam rangka mendukung peningkatan kinerja lembaga dan pegawai.

b. Kementerian Pekerjaan Umum

Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman diselenggarakan dalam rangka mencapai visi jangka panjang: “Tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman yang Andal untuk Mendukung Indonesia Sejahtera 2025”. Adapun beberapa misi dari Kementerian PU untuk mencapai visi tersebut yang menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan agar tercipta kesinergisan pelaksanaan pembangunan antara lain :

1. Mewujudkan penataan ruang sebagai acuan matra spasial dari pembangunan nasional dan daerah
2. Menyelenggarakan pengelolaan SDA secara efektif dan optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi dan keberlanjutan pemanfaatan SDA serta mengurangi resiko daya rusak air.
3. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
4. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif melalui pembinaan dan fasilitasi
5. pengembangan infrastruktur permukiman yang terpadu, andal dan berkelanjutan.
6. Menyelenggarakan industri konstruksi yang kompetitif dengan menjamin adanya keterpaduan pengelolaan sektor konstruksi,

7. proses penyelenggaraan konstruksi yang baik dan menjadikan pelaku sektor konstruksi tumbuh dan berkembang.
8. Menyenggarakan penelitian dan pengembangan serta penerapan: IPTEK, norma, standar, pedoman, manual dan/atau kriteria pendukung infrastruktur PU dan permukiman.

Arah kebijakan Kementerian PU dalam lima tahu kedepan menekankan pada pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA & SDM berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat; pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang semakin mantap; pengembangan infrastruktur perdesaan untuk mendukung pembangunan pertanian; pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat.

c. Bappeda Provinsi Jawa Timur

BAPPEDA Provinsi Jawa Timur merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan kewenangan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, tantangan pembangunan di bidang perencanaan pembangunan daerah yang diemban oleh BAPPEDA Provinsi Jawa Timur dalam periode 2009-2014 ke depan secara umum untuk terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur, juga merupakan tantangan tersendiri yang penting untuk diperhatikan.

Visi Rencana Strategis BAPPEDA Provinsi Jawa Timur untuk kurun waktu 2019-2023 yaitu Mewujudkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sebagai Perencana Yang Partisipatif, Profesional, Inovatif Dan Bertanggungjawab diarahkan pada upaya berkesinambungan pembangunan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan sebagai dasar

perumusan dan implementasi kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan sumberdaya daerah untuk meningkatkan kemakmuran dengan berlandaskan akhlak mulia. Adapun upaya untuk mewujudkan misi tersebut dilakukan dengan mengarahkan kepada peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM, pemantapan penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah dan peningkatan pendataan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

d. RPJP Kabupaten Lumajang

Visi rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Lumajang adalah terwujudnya Kabupaten Lumajang yang makmur, sejahtera dan bermartabat. Perwujudan pembangunan dalam RPJPD inipun diarahkan kepada pengembangan pembangunan dan pengelolaan potensi daerah secara menyeluruh. Adapun upaya yang dilakukan untuk mencapai visi adalah menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, berakhlak, dan berbudaya, mewujudkan pemerintahan yang berkualitas berlandaskan prinsip-prinsip good governance, mewujudkan perekonomian daerah yang kokoh berbasis pertanian, pariwisata, dan industri, meningkatkan infrastruktur daerah yang berkualitas dan mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera melalui pemerataan pembangunan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan salah satu dokumen perencanaan jangka panjang sesuai dengan UU Nomor 26 tahun 2007

dimana untuk RTRW Kabupaten Lumajang sudah ditetapkan dan sudah dapat dijadikan pedoman dalam penataan ruang dan pengembangan wilayah sesuai dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2012-2032.

Penelaahan terhadap RTRW ini difokuskan pada penetapan rencana dalam struktur ruang wilayah yang meliputi system perkotaan, System pedesaan, system jaringan transportasi darat, system jaringan transportasi laut, system jaringan telekomunikasi, system jaringan energi, system jaringan sumberdaya air dan system jaringan prasarana lainnya. Serta rencana pola ruang wilayah meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Penetapan Isu PD (T-B.35)			Tabel T-C.25	
				Masalah pokok	Masalah	Akar Masalah	Tujuan	Sasaran
				-	-	-	-	-
“Terwujudnya masyarakat lumajang yang berdaya saing, makmur, dan bermartabat”	Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance) yang berbasis teknologi.	Meningkatkan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan kepuasan masyarakat	Belum Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi dan kapasitas Aparatur Daerah	Kurangnya Indeks Kepuasan terhadap pelayanan publik	Kurangnya pemahaman aparat Kecamatan terhadap peraturan perundang-undangan	Meningkatkan kepuasan masyarakat	
						Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik		Mengoptimalkan fasilitasi dan koordinasi Kecamatan

						Kurangnya publikasi terkait prosedur/ alur pelayanan di Kecamatan		Meningkatnya akuntabilitas Pemerintahan Desa
						Kurangnya pemahaman masyarakat dan petugas tentang tertib administrasi pelayanan Kecamatan		

BAB
IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Lumajang → bisa saja dimasukan tujuan dan sasaran pembangunan gender sesuai tusi Kecamatan Lumajang

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Lumajang di presentasikan dalam tabel 3.1 sebagaimana berikut ini:

Tabel 3.1 - T-C. 25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
-	-	I-T1					
Meningkatkan kepuasan masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat	86,32	86,32	82,00	82,50	83,00
	Mengoptimalkan fasilitasi dan koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	80%	85%	91%	92%	93%
	Meningkatnya akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata - rata persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi Pemerintahan Desa tepat waktu	75%	80%	83%	84%	85%

Tujuan jangka menengah Kecamatan Lumajang secara umum adalah meningkatkan kinerja kualitas Pelayanan Kecamatan, Meningkatnya Kualitas Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan, Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa.

BAB V**STRATEGI DAN ARAH
KEBIJAKAN**

Strategi dan kebijakan dalam Perubahan Renstra Kecamatan Lumajang adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Lumajang yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan P-RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Lumajang menunjukkan bagaimana cara Kecamatan Lumajang mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Kecamatan Lumajang dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas P-RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Lumajang.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Kecamatan Lumajang selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Kecamatan Lumajang bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Lumajang.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Kecamatan Lumajang mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik juga mendukung program/kegiatan yang dapat menciptakan layanan masyarakat yang baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Kecamatan Lumajang untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten Lumajang.

Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka untuk mencapainya telah dipilih beberapa strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel 5.1 - T-C 26
Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kepuasan masyarakat		Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat	Meningkatkan kualitas SDM, serta kualitas dan kuantitas Sarpras Kecamatan
	Mengoptimalkan fasilitasi dan koordinasi Kecamatan		Mengoptimalkan pengetahuan tentang tertib administrasi pelayanan Kecamatan dan pemberdayaan masyarakat
	Meningkatnya akuntabilitas Pemerintahan Desa		

**BAB
VI****RENCANA PROGRAM DAN
KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang tahun 2021- 2023 dapat dilihat pada tabel TC - 27.

Tabel 6.1 - TC – 27

T.C-27																	
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan (2020)	2019 (Kondisi awal)		2020 (Kondisi awal)		2021		2022		2023		Periode akhir		Unit Kerja	Lokasi
				Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%					100%	7.663.962.874	100%	7.705.276.371	100%	7.705.276.399	100%	23.074.515.644		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%					100%	20.682.250	100%	14.710.250	100%	14.710.250	100%	50.102.750		
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							0 Dokumen		- 2 Dokumen		1.000.000	2 Dokumen	1.000.000		
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen					8 Dokumen	19.910.250	1 Dokumen	13.472.750	1 Dokumen	8.472.750	1 Dokumen	41.855.750		
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							0 Dokumen		- 2 Dokumen		1.000.000	2 Dokumen	1.000.000		
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD							0 Dokumen		- 1 Dokumen		1.000.000	1 Dokumen	1.000.000		
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD							0 Dokumen		- 1 Dokumen		1.000.000	1 Dokumen	1.000.000		
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen					1 Dokumen	772.000	2 Laporan	1.237.500	5 Laporan	1.237.500	5 Laporan	3.247.000		
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							0 Laporan		- 12 Laporan		1.000.000	12 Laporan	1.000.000		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%					100%	5.132.679.738	100%	5.592.934.399	100%	5.592.934.399	100%	16.318.548.536		
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 ASN					62 ASN	4.887.970.752	62 Orang/ Bulan	5.307.193.899	62 Orang/ Bulan	5.307.193.899	62 Orang/ Bulan	15.502.358.550		
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Fasilitasi					2 Fasilitasi	227.410.986	1 Dokumen	277.392.000	12 Dokumen	275.392.000	12 Dokumen	780.194.986		
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							0 Dokumen		- 12 Dokumen		1.000.000	12 Dokumen	1.000.000		
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD							0 Dokumen		- 12 Dokumen		1.000.000	12 Dokumen	1.000.000		
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8 Laporan Keuangan					8 Laporan Keuangan	17.298.000	1 Laporan	8.348.500	6 Laporan	5.348.500	6 Laporan	30.995.000		
7.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan							0 Dokumen		- 2 Dokumen		1.000.000	2 Dokumen	1.000.000		
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD							0 Laporan		- 18 Laporan		1.000.000	18 Laporan	1.000.000		
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran							0 Dokumen		- 1 Dokumen		1.000.000	1 Dokumen	1.000.000		
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100%					100%	23.886.000	100%	25.938.000	100%	25.938.014	100%	75.762.014		
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							0 Dokumen		- 2 Dokumen		1.000.000	2 Dokumen	1.000.000		
7.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							0 Dokumen		- 1 Dokumen		1.000.000	1 Dokumen	1.000.000		
7.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD							0 Laporan		- 1 Laporan		1.000.000	1 Laporan	1.000.000		
7.01.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD							0 Laporan		- 1 Laporan		1.000.000	1 Laporan	1.000.000		

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan (2020)	2019 (Kondisi awal)		2020 (Kondisi awal)		2021		2022		2023		Periode akhir		Unit Kerja	Lokasi
				Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							-	0 Laporan	-	2 Laporan	1.000.000	2 Laporan	1.000.000		
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Dokumen					8 Dokumen	23.886.000	0 Laporan	25.938.000	12 Laporan	19.938.000	12 Laporan	69.762.000		
7.01.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD								0 Dokumen		1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000		
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	100%					100%	36.010.000		-		700.000	100%	36.710.000		
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Jenis					1 Jenis	36.010.000	0 Paket	-	1 Paket	100.000	1 Paket	36.110.000		
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								0 Dokumen	-	12 Dokumen	100.000	12 Dokumen	100.000		
7.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian								0 Dokumen	-	1 Dokumen	100.000	1 Dokumen	100.000		
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai								0 Dokumen	-	1 Dokumen	100.000	1 Dokumen	100.000		
7.01.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan								0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-		
7.01.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas								0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-		
7.01.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan								0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-		
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan								0 Orang	-	1 Orang	100.000	1 Orang	100.000		
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								0 Orang	-	1 Orang	100.000	1 Orang	100.000		
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								0 Orang	-	1 Orang	100.000	1 Orang	100.000		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	100%					100%	379.680.010	100%	366.109.340	100%	365.409.340	100%	1.111.198.690		
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Jenis					7 Jenis	13.216.520	8 Paket	13.444.130	8 Paket	10.744.130	8 Paket	37.404.780		
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan								0 Paket	-	1 Paket	1.000.000	1 Paket	1.000.000		
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan								0 Paket	-	1 Paket	1.000.000	1 Paket	1.000.000		
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Jenis					4 Jenis	194.044.220	8 Paket	173.629.030	8 Paket	173.629.030	8 Paket	541.302.280		
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Jenis					3 Jenis	53.688.270	8 Paket	60.304.180	8 Paket	59.304.180	8 Paket	173.296.630		
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Jenis					1 Jenis	8.580.000	0 Dokumen	-	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	9.580.000		
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan								0 Paket	-	1 Paket	1.000.000	1 Paket	1.000.000		
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Fasilitasi					1 Fasilitasi	11.850.000	1 Laporan	3.000.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	16.850.000		
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Fasilitasi					2 Fasilitasi	98.301.000	8 Laporan	115.732.000	8 Laporan	113.732.000	8 Laporan	327.765.000		
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								0 Dokumen	-	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000		
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								0 Dokumen	-	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD	100%					100%	278.683.550	100%	19.524.010	100%	19.524.024	100%	317.731.584		
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan								0 Unit	-	1 Unit	1.000.000	1 Unit	1.000.000		
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan								0 Unit	-	1 Unit	1.000.000	1 Unit	1.000.000		
7.01.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan								0 Unit	-	1 Unit	1.000.000	1 Unit	1.000.000		
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Jenis					6 Jenis	278.683.550	2 Unit	19.524.010	2 Unit	12.524.010	2 Unit	310.731.570		
7.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan								0 Unit	-	1 Unit	1.000.000	1 Unit	1.000.000		
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan								0 Unit	-	1 Unit	1.000.000	1 Unit	1.000.000		

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan (2020)	2019 (Kondisi awal)		2020 (Kondisi awal)		2021		2022		2023		Periode akhir		Unit Kerja	Lokasi
				Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan								0 Unit	-	1 Unit	1.000.000	1 Unit	1.000.000		
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan								0 Unit	-	1 Unit	1.000.000	1 Unit	1.000.000		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%					100%	1.557.750.286	100%	1.502.449.872	100%	1.502.449.872	100%	4.562.650.030		
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 fasilitasi					2 fasilitasi	110.526.000	2 Laporan	39.852.000	2 Laporan	39.852.000	2 Laporan	190.230.000		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Rekening					4 Rekening	196.738.286	8 Laporan	209.478.672	8 Laporan	208.478.672	8 Laporan	614.695.630		
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan								0 Laporan	-	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.000.000		
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Fasilitasi					1 Fasilitasi	1.250.486.000	8 Laporan	1.253.119.200	8 Laporan	1.253.119.200	8 Laporan	3.756.724.400		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%					100%	234.591.040	100%	183.610.500	100%	183.610.500	100%	601.812.040		
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya								0 Unit	-	1 Unit	1.000.000	1 Unit	1.000.000		
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Kendaraan					7 Kendaraan	94.671.400	28 Unit	94.460.500	28 Unit	92.460.500	28 Unit	281.592.400		
7.01.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya								0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-		
7.01.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya								0 Unit	-	1 Unit	1.000.000	1 Unit	1.000.000		
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara								0 Unit	-	1 Unit	1.000.000	1 Unit	1.000.000		
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Jenis					2 Jenis	89.800.000	130 Unit	89.150.000	130 Unit	84.150.000	130 Unit	263.100.000		
7.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara								0 Unit	-	1 Unit	1.000.000	1 Unit	1.000.000		
7.01.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara								0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-		
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Jenis					1 Jenis	50.119.640	0 Unit	-	1 Unit	1.000.000	1 Unit	51.119.640		
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi								0 Unit	-	1 Unit	1.000.000	1 Unit	1.000.000		
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi								0 Unit	-	1 Unit	1.000.000	1 Unit	1.000.000		
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	82%					82%	-	86%	-	90%	20.000.000	86%	20.000.000		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan								-			4.000.000		4.000.000		
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait								0 Laporan	-	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000		
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								0 Dokumen	-	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000		
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								-			6.000.000		6.000.000		
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan								0 Dokumen	-	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000		
7.01.02.2.02.02	Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan								0 Laporan	-	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								0 Laporan	-	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000		

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan (2020)	2019 (Kondisi awal)		2020 (Kondisi awal)		2021		2022		2023		Periode akhir		Unit Kerja	Lokasi
				Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase fasilitasi Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum									-		4.000.000		4.000.000		
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum								0 Dokumen	-	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000		
7.01.02.2.03.02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta								0 Unit	-	1 Unit	2.000.000	1 Unit	2.000.000		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat									-		6.000.000		6.000.000		
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan								0 Dokumen	-	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000		
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan								0 Laporan	-	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000		
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan								0 Laporan	-	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	82%					82%	4.761.345.248	86%	3.506.178.910	86%	3.506.178.924	86%	11.773.703.082		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	100%					100%	18.441.000	100%	27.236.500	100%	27.236.500	100%	72.914.000		
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2 Unsur					2 Unsur	2.816.000	4 Lembaga Kemasyarakatan	2.835.000	4 Lembaga Kemasyarakatan	2.835.000	4 Lembaga Kemasyarakatan	8.486.000		
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan								0 Dokumen	-	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000		
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Fasilitasi					3 Fasilitasi	15.625.000	1 Laporan	24.401.500	1 Laporan	23.401.500	1 Laporan	63.428.000		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan kelurahan	100%					100%	3.976.639.858		3.470.542.410		3.470.542.410		10.917.724.678		
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	80 Orang					80 Orang	48.684.250	4 Lembaga Kemasyarakatan	34.241.750	4 Lembaga Kemasyarakatan	34.241.750	4 Lembaga Kemasyarakatan	117.167.750		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Jenis					1 Jenis	194.613.098	2 Unit	16.982.460	2 Unit	16.982.460	2 Unit	228.578.018		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	480 Orang					480 Orang	3.733.342.510	Pokmas/ Ormas	3.419.318.200	Pokmas/ Ormas	3.418.318.200	Pokmas/ Ormas	10.570.978.910		
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan								0 Laporan	-	7 Laporan	1.000.000	7 Laporan	1.000.000		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Prosentase fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan									-		500.000		500.000		
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan								0 Lembaga Kemasyarakatan	-	1 Lembaga Kemasyarakatan	100.000	1 Lembaga Kemasyarakatan	100.000		
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya								0 Lembaga Kemasyarakatan	-	1 Lembaga Kemasyarakatan	100.000	1 Lembaga Kemasyarakatan	100.000		
7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan								0 Unit	-	1 Unit	100.000	1 Unit	100.000		
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat								0 Laporan	-	1 Laporan	100.000	1 Laporan	100.000		
7.01.03.2.03.05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna								0 Laporan	-	1 Laporan	100.000	1 Laporan	100.000		
7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan PPKM	100%					100%	766.264.390	100%	8.400.000	100%	6.700.014	100%	781.364.404		
7.01.03.2.05.01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Kelurahan					1 Kelurahan	703.748.000	1 Dokumen	8.400.000	1 Dokumen	3.700.000	1 Dokumen	715.848.000		
7.01.03.2.05.02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan								0 Dokumen	-	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000		
7.01.03.2.05.03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan								0 Dokumen	-	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000		

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan (2020)	2019 (Kondisi awal)		2020 (Kondisi awal)		2021		2022		2023		Periode akhir		Unit Kerja	Lokasi
				Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.01.03.2.05.04	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah jenis peralatan /perlengkapan yang disediakan	5 jenis					5 jenis	62.516.390	0 Dokumen	- 1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	63.516.390			
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan									-	1.200.000	1.200.000				
		Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan															
7.01.03.2.06.01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengalaman Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengalaman Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara								0 Keluarga	- 7 Keluarga	100.000	7 Keluarga	100.000			
7.01.03.2.06.02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat								0 Keluarga	- 7 Keluarga	100.000	7 Keluarga	100.000			
7.01.03.2.06.03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga								0 Keluarga	- 7 Keluarga	100.000	7 Keluarga	100.000			
7.01.03.2.06.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri								0 Keluarga	- 7 Keluarga	100.000	7 Keluarga	100.000			
7.01.03.2.06.05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah								0 Keluarga	- 7 Keluarga	100.000	7 Keluarga	100.000			
7.01.03.2.06.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing								0 Keluarga	- 7 Keluarga	100.000	7 Keluarga	100.000			
7.01.03.2.06.07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat								0 Keluarga	- 7 Keluarga	100.000	7 Keluarga	100.000			
7.01.03.2.06.08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya								0 Keluarga	- 7 Keluarga	100.000	7 Keluarga	100.000			
7.01.03.2.06.09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup								0 Keluarga	- 7 Keluarga	100.000	7 Keluarga	100.000			
7.01.03.2.06.10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam								0 Keluarga	- 7 Keluarga	100.000	7 Keluarga	100.000			
7.01.03.2.06.11	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga								0 Keluarga	- 7 Keluarga	100.000	7 Keluarga	100.000			
7.01.03.2.06.12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas								0 Keluarga	- 7 Keluarga	100.000	7 Keluarga	100.000			
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	82%					82%	61.510.000	86%	129.660.000	86%	129.660.000	86%	320.830.000		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%					100%	61.510.000	100%	129.660.000	100%	125.660.000	100%	316.830.000		
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								- 0 Laporan	- 1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.000.000			
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	35 Orang					35 Orang	61.510.000	6 Laporan	129.660.000	6 Laporan	124.660.000	6 Laporan	315.830.000		
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Fasilitasi Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah									-	1.000.000	1.000.000				
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia								0 Laporan	- 1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.000.000			

Perubahan Rencana Strategis 2018 – 2023

RENSTRA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan (2020)	2019 (Kondisi awal)		2020 (Kondisi awal)		2021		2022		2023		Periode akhir		Unit Kerja	Lokasi
				Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.01.04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum									-		2.000.000		2.000.000		
7.01.04.7.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								0 Laporan	-	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.000.000		
7.01.04.7.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat								0 Laporan	-	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.000.000		
7.01.04.7.04	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah									-		1.000.000		1.000.000		
7.01.04.7.04.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia								0 Laporan	-	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.000.000		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%					100%	1.800.000	100%	2.400.000	100%	2.400.000	100%	6.600.000		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%					100%	1.800.000	100%	2.400.000	100%	2.400.000	100%	6.600.000		
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia								0 Orang	-	1 Laporan	100.000	1 Laporan	100.000		
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah sosialisasi Wawasan kebangsaan								0 Orang	-	1 Laporan	100.000	0 Orang	100.000		
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa								0 Orang	-	1 Laporan	100.000	0 Orang	100.000		
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional								0 Orang	-	1 Laporan	100.000	0 Orang	100.000		
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan								0 Laporan	-	1 Laporan	100.000	0 Laporan	100.000		
7.01.05.2.01.06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila								0 Lembaga Masyarakat	-	1 Laporan	100.000	0 Lembaga Masyarakat	100.000		
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal								0 Dokumen	-	1 Laporan	100.000	0 Dokumen	100.000		
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 Fasilitasi					2 Fasilitasi	1.800.000	0 Dokumen	2.400.000	1 Laporan	1.700.000	0 Dokumen	5.900.000		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	82%					82%	165.000.000	82%	129.600.000	82%	129.600.014	82%	424.200.014		
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu						82%				82%		82%			
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu						82%				82%		82%			
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	100%					100%	165.000.000	100%	129.600.000	100%	129.600.014	100%	424.200.014		
		Jumlah Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu															
		Jumlah Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu															
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa								0 Dokumen	-	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000		
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 Desa					5 Desa	129.600.000	5 Dokumen	129.600.000	5 Dokumen	112.600.000	5 Dokumen	371.800.000		
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa								0 Dokumen	-	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000		

Perubahan Rencana Strategis 2018 – 2023

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan (2020)	2019 (Kondisi awal)		2020 (Kondisi awal)		2021		2022		2023		Periode akhir		Unit Kerja	Lokasi
				Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.01.06.2.01.04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan								0 Laporan	-	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000		
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa								0 Dokumen	-	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000		
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa								0 Dokumen	-	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000		
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa								0 Dokumen	-	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000		
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat De								0 Dokumen	-	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000		
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa								0 Dokumen	-	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000		
7.01.06.2.01.10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan								0 Dokumen	-	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000		
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	105 orang					105 orang	35.400.000	0 Dokumen	-	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	36.400.000		
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan								0 Dokumen	-	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000		
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif								0 Dokumen	-	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000		
7.01.06.2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga								0 Dokumen	-	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000		
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa								0 Dokumen	-	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000		
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa								0 Dokumen	-	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000		
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya								0 Dokumen	-	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000		
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan								0 Laporan	-	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.000.000		
									12.653.618.122		11.473.115.281		11.493.115.337		35.619.848.740		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Didalam bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari Kecamatan Lumajang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel 7.1 - T-C 28

TC 28 INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai IKM	85,25	86	87	88	89	90	90
2	Nilai IKM Kecamatan	86,32	86,32	86,32	82,00	82,50	83,00	83,00
3	Persentase hasil fasilitasi dan kooordinasi yang ditindaklanjuti	75%	75%	80%	91%	92%	93%	93%
4	Rata -rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	80%	80%	85%	83,00%	84,00%	85,00%	85,00%

Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan paskah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak.

**BAB
VIII****PENUTUP**

Renstra Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang periode 2019-2023 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Lumajang untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2019-2023, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang.

Renstra Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang periode Kabupaten Lumajang harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang sesuai dengan pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Lumajang, 07 Pebruari 2022
CAMAT LUMAJANG

Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si.
NIP 19701218 199101 1 002